

PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BERBASIS PRODUK BERNILAI KEARIFAN LOKAL UNTUK Penguatan Pendidikan KARAKTER

Sa'dun Akbar
Universitas Negeri Malang
Sadun.akbar.fip@um.ac.id

Visi kurikulum muatan lokal (mulok) disamping bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah juga untuk pewarisan nilai-nilai budaya setempat bagi peserta didik. Dalam praktiknya ada kecenderungan kurang-jelas potensi daerah apa yang dikembangkan melalui mata pelajaran muatan lokal jika mapel muloknya adalah Bahasa Daerah. Selain itu, ada kecenderungan keseragaman mata pelajaran muatan lokal dalam satu provinsi atau satu kabupaten/kota padahal dalam satu provinsi dan kabupaten/kota terdapat banyak dan beragamnya potensi dan budaya lokal. Kecenderungan keseragaman mata pelajaran muatan lokal tersebut juga kurang sesuai dengan karakteristik kurikulum berbasis kompetensi yang mementingkan keberagaman dengan pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media pembelajaran dari situasi kehidupan riil terdekat dengan kehidupan peserta didik.

Arah tuntutan pembelajaran dalam kurikulum terbaru (kurikulum 2013) yang berlaku dewasa ini yaitu dengan menggunakan pendekatan *scientific*, model-model pembelajaran, seperti *problem based learning*, *project based learning*, *discovery learning*, *inquiry learning*. Penggunaan pendekatan dan model tersebut bertujuan untuk membangun generasi yang kritis, kreatif, kolaboratif, produktif, dan komunikatif yang sangat diperlukan bagi generasi di abad kedua puluh 21 ditambah lagi dalam era revolusi industri 4.0. Berdasarkan visi mata pelajaran muatan lokal, yang tentunya berbeda dengan muatan nasional dan institusional, dan kajian tentang potensi daerah didukung lagi dengan tuntutan yang tercakup dalam kurikulum 2018 maka diperlukan adanya terobosan dan arah baru penyelenggaraan kurikulum nasional, terutama muatan lokal. Terobosan tersebut tentunya dengan mempertimbangkan adanya potensi daerah yang bersifat lokal dan sangat beragam, dengan warisan budaya yang sangat luas, mencakup seluruh unsur budaya: misalnya bahasa, kesenian, mata pencaharian, sistem pengetahuan dan teknologi, dan sistem religi, dan lainnya, yang kemudian sangat memungkinkan dikembangkan sebagai mata pelajaran muatan lokal yang sangat beragam di level satuan pendidikan.

Penelitian kebijakan dalam kerangka pengembangan kurikulum muatan lokal alternatif berbasis produk bernilai kearifan lokal ini dilakukan dalam kerangka mengembangkan potensi daerah—lokal, dan pewarisan nilai-nilai budaya dalam arti luas seluas unsur-unsur budaya sebagaimana terurai di atas. Kurikulum alternatif ini sangat potensial untuk membangun generasi masa depan yang kritis, kreatif, kolaboratif, produktif, dan komunikatif. Tidak hanya produktif tetapi bisa mengkomunikasikan, mempromosikan, memasarkan/menjual produknya kepada bangsa bangsa lain.

Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Dewasa Ini

Ditemukan fakta bahwa ada kecenderungan keseragaman mata pelajaran muatan lokal dalam satu provinsi. Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Timur misalnya seluruh Sekolah Dasar (SD) ditetapkan bahwa mata pelajaran muatan lokalnya adalah Bahasa Jawa. Sementara itu, di provinsi Kalimantan Selatan mata pelajaran muatan lokalnya

adalah Bahasa Banjar. Diduga, Diprovinsi-provinsi lain juga terjadi hal yang mirip. Kecenderungan mata pelajaran "Bahasa Daerah Tertentu" yang seragam dalam satu propinsi ini menjadikan pelaksanaan pembelajaran muatan lokal menghadapi banyak masalah.

Masalah utama yang dirasakan di hampir setiap provinsi adalah masalah guru. Guru bahasa Jawa misalnya sangat langka, di pulau Jawa hanya terdapat enam program studi bahasa Jawa yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, padahal hampir setiap sekolah memerlukan guru bahasa Jawa untuk membelajarkan muatan lokal bahasa Jawa. Sementara itu, hal yang lebih tragis terjadi di Kalimantan Selatan yang belum ada perguruan tinggi yang membuka program studi Bahasa Banjar.

Belum lagi, terdapat keberagaman bahasa daerah yang berbeda-beda dalam satu provinsi. Sama-sama bahasa Jawa misalnya, bahasa Jawa yang ada di Jawa tetapi dialektanya berbeda-beda. Oleh karena itu, di berbagai daerah di Jawa ada kecenderungan kesulitan mengajarkan bahasa Jawa standard. Masalah lain yang dihadapi adalah masalah sumber dan media pembelajaran bahasa daerah, buku ajar, dan asesmennya. Dari berbagai permasalahan dan kecenderungan keseragaman pembelajaran Bahasa Daerah di berbagai provinsi dan daerah tersebut ternyata kurang mampu menciptakan pembelajaran yang berorientasi kompetensi dalam rangka menghasilkan produk kongkrit yang bernilai ekonomi, walaupun tentu tetap memperhatikan aspek lain, misalnya pembelajaran di SD diarahkan pada 80% penanaman afektif, sikap yang baik.

Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Alternatif

Mata pelajaran muatan lokal alternatif yang sangat dimungkinkan untuk dikembangkan dan potensial mengembangkan potensi daerah dan pewarisan nilai-nilai budaya lokal yang sangat beragam adalah pengembangan mata pelajaran muatan lokal berbasis produk bernilai kearifan lokal. Hal tersebut karena ditemukan banyak sekali berbagai produk lokal yang bernilai kearifan lokal yang dapat memiliki potensi untuk dikembangkan, yang selama ini masih belum dieksplorasi dengan baik. Hal itu, dibuktikan dengan pelaksana pendidikan di level satuan pendidikan (Kepala SD, Pengawas SD, dan Guru Mulok di SD) yang telah mampu mengidentifikasi berbagai produk lokal yang bernilai kearifan lokal kemudian memilihnya menjadi mapel muatan lokal (berdasarkan hasil FGD dan Workshop pada beberapa Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Selatan). Mereka mampu merancang dalam Silabus Mulok Alternatif di level satuan pendidikan, Silabus tersebut secara akademik layak sebagai kurikulum muatan lokal, dan menurut calon pengguna silabus yang dihasilkan juga sangat praktis dan keterterapannya sangat tinggi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kurikulum (Mata Pelajaran) Muatan Lokal alternatif ini sangat mampu mengembangkan potensi daerah yang bersifat lokal sampai level satuan pendidikan, mampu menghasilkan beragam produk bernilai kearifan lokal, dan melalui pembelajaran dengan pendekatan *scientific*, dengan model-model pembelajaran: *Problem Based Learning*, *Project Based Learning*, *Discovery*, *Inquiry*, dapat membangun generasi 4.0 yang kritis, kreatif, kolaboratif, produktif, dan mampu memasarkan berbagai produk yang dihasilkan melalui pembelajaran mata pelajaran muatan lokal.

Pada tabel berikut ini disajikan ilustrasi berbagai mata pelajaran muatan lokal yang memungkinkan dapat dikembangkan di level satuan pendidikan dasar yang berorientasi produk bernilai kearifan lokal yang sangat beragam, sebagai berikut.

| Pewarisan Nilai Budaya berbasis Unsur-Unsur Budaya | Mapel Mulok Alternatif (Misalnya) | Orientasi Produk Lokal Potensial Pengembangan Potensi Daerah. |
|---|--|---|
| Bahasa | Bahasa Jawa, Madura, Banjar, Sunda, dan lain-lain. | <i>Pranata cara, Waranggana, Cipta Lagu Jawa, Berbagai Souvenir berbasis Bahasa, dan lain-lain.</i> |
| Mata Pencaharian | Pertanian Cabe; Budidaya Ikan Patin, Pengolahan Hasil Laut; Pengolahan Tempe Sanan, dan lain-lain. | Berbagai Produk Pertanian, Kelautan, Perkebunan, dll. |
| Sistem Religi | Aneka Pengolahan Produk untuk Ritual Keagamaan, dan lain-lain. | Ambengan, Tumpeng, Ketupat dan Lepet, Merang-kai Sesaji, dan lain-lain. |
| Sistem Pengetahuan, Teknologi, dan Peralatan Hidup. | Teknik Membatik, Menyulam, Membordir, Menanam Anggrek, Mengasin Ikan, dan lain-lain. | Teknologi Tepat Guna, Barang dan Jasa, dan lain-lain. |
| Kesenian | Wayang Kulit, Reog Ponorogo, dan lain-lain. | Dalang Cilik, Berbagai Assesories Reog, dan lain-lain. |

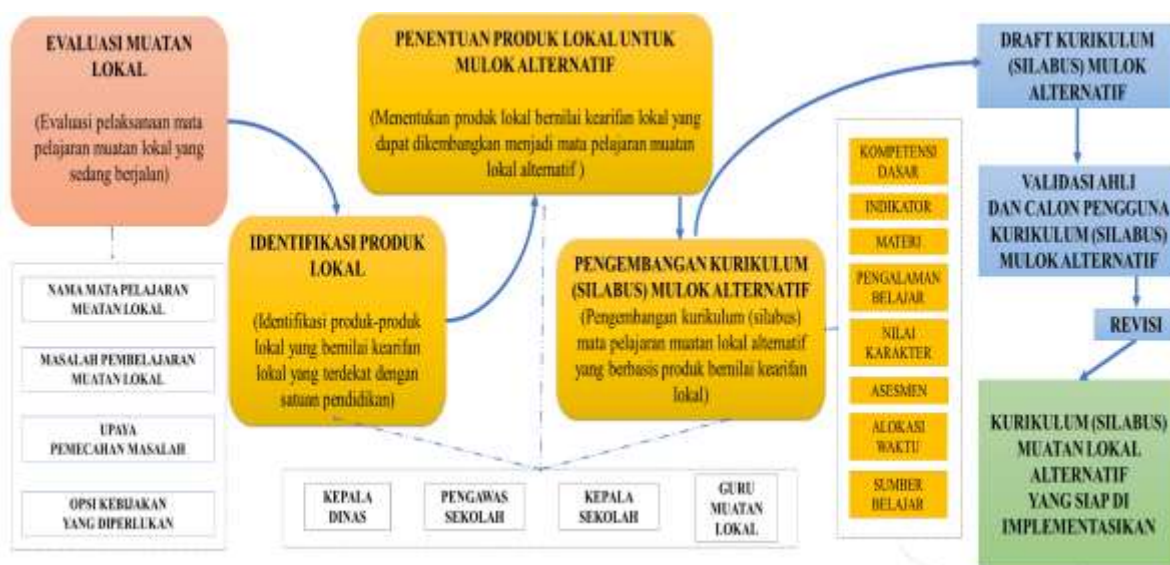
Tahapan pertama, yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan mata pelajaran muatan lokal yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan dengan menitikberatkan pada nama mata pelajaran muatan lokal yang sedang berjalan, masalah pembelajaran muatan lokal yang terjadi selama ini, upaya pemecahan masalah yang selama ini telah dilakukan, dan kemungkinan opsi kebijakan yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang muncul.

Tahapan kedua, yaitu melakukan identifikasi produk-produk lokal yang bernilai kearifan lokal yang terdekat di satuan pendidikan oleh kepala dinas, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Dari kegiatan identifikasi tersebut, kemudian ditemukan potensi lokal daerah (kesenian, kuliner, kerajinan tangan, destinasi wisata dan budaya) yang sangat kaya, beragam, dan bernilai kearifan lokal tinggi di lokasi-lokasi terdekat dengan satuan pendidikan (sekolah dasar).

Tahapan ketiga, yaitu menentukan produk lokal bernilai kearifan lokal yang dapat dikembangkan menjadi mata pelajaran muatan lokal alternatif di satuan pendidikan terdekat oleh kepala dinas, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Setelah dilakukan identifikasi potensi daerah terdekat kemudian dilakukan analisis terhadap potensi yang ada dan memilih salah satu dari sekian banyak potensi daerah yang dapat dikembangkan sebagai bahan muatan lokal alternatif. Potensi lokal daerah

tersebut dapat dikembangkan menjadi mata pelajaran muatan lokal (alternatif) yang berorientasi pada produk bernilai kearifan lokal. Mata pelajaran muatan lokal alternatif ini juga dapat mengembangkan kemampuan abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, produktif, dan komunikatif. Pengembangan muatan lokal alternatif sangat potensial yang tidak hanya produktif tetapi juga mampu memasarkan produknya secara global.

Tahapan keempat, yaitu melakukan pengembangan kurikulum (silabus) mata pelajaran muatan lokal alternatif yang berbasis produk bernilai kearifan lokal pada satuan pendidikan oleh kepala dinas, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Pengembangan silabus dilakukan dengan menentukan dan mengembangkan kompetensi dasar, indikator, materi, pengalaman belajar (kegiatan belajar), nilai-nilai karakter yang dimunculkan, asesmen yang dilakukan, alokasi waktu yang diperlukan, dan sumber dan media yang mendukung pembelajaran. Tahapan kelima yaitu melakukan validasi ahli dan calon pengguna terhadap kurikulum (silabus) mata pelajaran muatan lokal alternatif. Tahapan terakhir yaitu melakukan revisi dan kemudian dihasilkan produk kurikulum (silabus) yang siap di implementasikan. Hasil produk kurikulum tersebut yaitu seperangkat kurikulum (silabus) yang dikembangkan dari unsur dinas pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru dan telah teruji kevalidan dan keterterapannya. Uraian tahapan di atas dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini



Gambar Model Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Alternatif

Model Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Nilai-nilai Kearifan Lokal sangat memiliki nilai karakter yang dapat dibanggakan. Nilai karakter utama dalam Gerakan Nasional Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) juga dapat masuk dalam nilai-nilai kearifan lokal. Nilai karakter religius, nasionalisme, gotong-royong, mandiri, dan integritas. Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang terpadu.

Selain itu, dalam konteks kelas, nilai-nilai kearifan lokal dapat dihadirkan melalui proses pembelajaran pada Mata Pelajaran Muatan Lokal berbasis produk bernilai kearifan lokal. Hampir setiap pembelajaran yang berorientasi untuk menghasilkan produk (barang dan jasa) senantiasa terdapat nilai-nilai karakter (afektif,

seperti yang dikehendaki dalam kurikulum dan tujuan pendidikan peserta didik jenjang SD) yang dihadirkan. Pembelajaran tentang Pengolahan hasil laut bagi peserta didik di SD wilayah pesisir misalnya, terdapat nilai gotong royong, Kemandirian, Kecintaan pada Produksi dalam Negeri, dan lainnya, tergantung produk dan proses pembelajarannya.

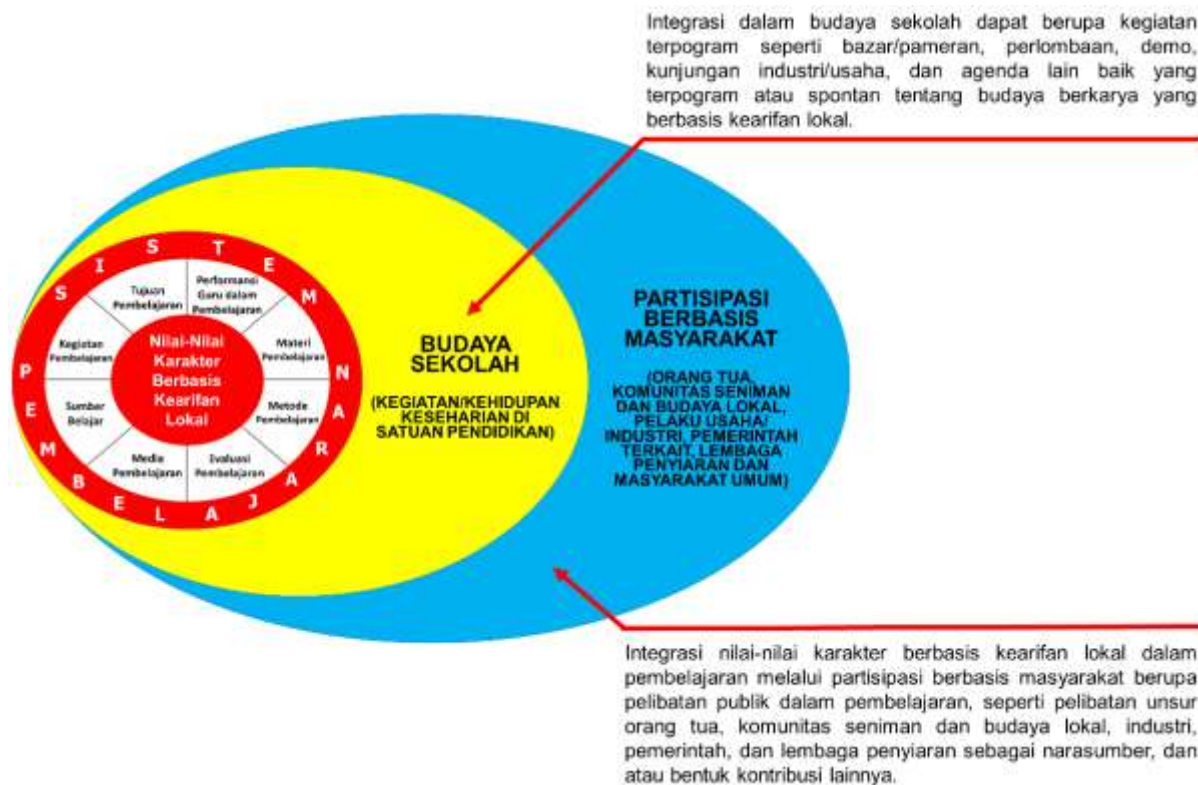
Nilai-nilai kearifan lokal yang teridentifikasi dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran. Jika mengacu kepada pembelajaran berarti mengacu kepada suatu sistem dalam pembelajaran itu sendiri yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Komponen tersebut antara lain tujuan, materi, kegiatan, metode, media, sumber belajar, dan evaluasi. Berdasarkan hasil *focus group discussion* dan *workshop* juga ditemukan fakta bahwa nilai-nilai kearifan lokal dapat dikembangkan melalui kurikulum (silabus), rencana pelaksanaan pembelajaran dalam mata pelajaran secara umum, dan secara khusus pada mata pelajaran muatan lokal; terintegrasi ke dalam metode, terintegrasi pada sumber dan media pembelajaran, dan dalam proses asesmen autentik.

Nilai-nilai kearifan lokal juga dapat diintegrasikan ke dalam budaya sekolah. Kegiatan bazar produk pembelajaran mata pelajaran muatan lokal dapat dilakukan secara berkala di sekolah, pameran produk bernilai kearifan lokal dapat di pajang di ruang pameran; pemajangan poster-kampanye untuk kecintaan produksi lokal dalam negeri dapat dilakukan setiap saat. Perlombaan-perlombaan produk bernilai kearifan lokal juga dapat dilakukan secara berkala di sekolah. Pengembangan yang semacam tersebut melalui kegiatan yang terprogram oleh sekolah sehingga hasil-hasil dari pembelajaran muatan lokal dapat terdiseminasikan. Untuk itu, kegiatan 10 terprogram tersebut di laksanakan oleh sekolah dengan bantuan dari pihak-pihak terkait. Selain kegiatan terprogram dalam kegiatan bazar produk, pameran produk, dan perlombaan, juga dapat diagendakan kegiatan lain yang memacu siswa dalam berkarya dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Nilai-nilai kearifan lokal juga dapat diintegrasikan melalui keterlibatan (partisipasi) masyarakat. Dalam hal ini, kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan pelibatan masyarakat sebagai sumber yang memperkaya khasanah pengetahuan siswa. Kegiatan tersebut dapat dilakukan baik dalam proses pembelajaran di kelas yang melibatkan mereka, maupun dalam melakukan pemasaran hasil produksi peserta didik. Kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dapat berupa pelibatan orang tua sebagai narasumber, pelaku usaha/industri sebagai narasumber, pelaku seni/budaya sebagai narasumber, perusahaan/industri dan sanggar seni/budaya sebagai sumber belajar, masyarakat sebagai konsumen, dinas terkait sebagai mitra sekolah dalam pengembangan dan pemasaran produk.

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa nilai-nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas (melalui sistem pembelajarannya, budaya sekolah, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, model integrasi nilai-nilai kearifan lokal dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar Model Integrasi Nilai-Nilai Karakter Berbasis Kearifan Lokal



Opsi Kebijakan

Keragaman geografis dan sosiologis Indonesia menuntut dikembangkannya praksis pendidikan yang akomodatif dan apresiatif terhadap keberagaman masyarakat di tanah air. Dalam pusaran kebijakan pendidikan nasional yang lebih demokratis dan desentralistik, keterlibatan *stakeholders* dalam perumusan, implementasi dan evaluasi semakin penting diperhatikan. Dalam tinjauan historisnya, partisipasi *stakeholders* dalam evaluasi kurikulum muatan lokal masih kurang mendapat perhatian. Padahal, melalui evaluasi yang memenuhi kriteria ilmiah dan mempertimbangkan sisi kontekstualnya merupakan prasyarat perumusan kebijakan yang lebih baik. Kurikulum muatan lokal yang telah diimplementasikan sejak lama, dalam banyak hal masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satu diantaranya berkaitan relevansinya dengan perubahan sosial dan tuntutan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, evaluasi memainkan peran signifikan. Model evaluasi responsif yang menekankan keterlibatan *stakeholders* secara berkelanjutan, berdasarkan sejumlah penelitian terbukti memberi kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas partisipasi dan kebermaknaan program atau kegiatan. Pengembangan kurikulum muatan lokal sebagai basis dalam pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik sangatlah relevan.

Untuk itu penggalian dan revitalisasi potensi lokal yang bernilai kearifan lokal yang terdapat pada setiap daerah dan wilayah di Indonesia menduduki posisi penting untuk dilakukan. Pada tingkatan implementasinya, sinergi para pengambil kebijakan, untuk membangun kultur yang memungkinkan nilai dan budaya lokal dapat di semai pada level sekolah mutlak diperlukan. Dukungan berbagai pihak dalam mewujudkan

iklim yang kondusif bagi enkulturasi nilai dan budaya lokal merupakan prasyarat yang penting dalam keberhasilan upaya ini.

Berikut ini beberapa opsi kebijakan di level pusat, provinsi, kota/kabupaten, dan sekolah yang dapat di ambil oleh pemangku kepentingan.

1. Kebijakan di Level Pusat

Perlu kebijakan nasional yang memberikan kewenangan kewenangan untuk pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis produk bernilai kearifan lokal di tingkat satuan pendidikan.

2. Kebijakan di Level Provinsi

Perlu peraturan gubernur yang isinya meninjau kembali peraturan gubernur yang bersifat menyeragamkan mata pelajaran muatan lokal untuk sekolah-sekolah dalam wilayah provinsi.

3. Kebijakan di Level Kota/Kabupaten

Pembuatan payung hukum terkait perencanaan anggaran dan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran pada mata pelajaran muatan lokal berbasis produk bernilai kearifan lokal. Selain itu, perlu adanya upaya yang dilakukan oleh daerah untuk memetakan kantong-kantong potensi lokal di wilayahnya yang dapat dikembangkan menjadi muatan lokal alternatif. Kantong-kantong potensi daerah ini digali dari berbagai unsur masyarakat. Setelah dilakukan penggalian potensi lokal melalui kantong-kantong itu, para pemangku kepentingan di bidang pendidikan (kepala dinas, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan *stakeholders* lain untuk melakukan diskusi kelompok terpumpun dalam menghasilkan potensi daerah apa saja yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar alternatif yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi muatan lokal alternatif dari peta kantong potensi daerah yang telah dibuat. Kemudian, perlu adanya sosialisasi, workshop, dan pendampingan cara pembuatan kurikulum muatan lokal alternatif berdasar potensi daerah yang telah ditentukan tersebut.

4. Kebijakan di Level Sekolah

Dalam kerangka optimalisasi pelaksanaan kurikulum muatan lokal berbasis produk bernilai kearifan lokal, pihak sekolah perlu berkolaborasi dan bersinergi dengan orang tua, lembaga swadaya masyarakat, komunitas budaya, dan industri setempat (di sekitar sekolah), untuk secara bersama-sama membangun komitmen dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kurikulum muatan lokal tersebut. Untuk mewujudkan pengembangan muatan lokal ini maka perlu diambil langkah kebijakan sebagai berikut. *Pertama*, perencanaan dan pelaksanaan pelatihan bagi guru muatan lokal secara berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. *Kedua*, pembuatan payung hukum terkait perencanaan anggaran dan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran.